



Conceptual Article

Melihat Kembali Potret Pendidikan di Indonesia

Khusnan Iskandar,^{1*}

¹ Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia.

Article Info

Received: 11 Juli 2022

Revised: 18 Juli 2022

Accepted: 04 Agustus 2022

Available Online: 10 Agustus 2022

Keywords:

Education;

Indonesia;

Quality;

Improve Accessibility

p_2775-2682/e_2775-2690/

© 2022 The Authors. Published by
Academia Publication. Ltd This is
an open access article under the CC
BY-SA license.



Abstract

This article is a conceptual study that aims to determine the condition of education in Indonesia. The analysis used is content analysis by combining various theories studied. Education has an important role in the development of a country, including in Indonesia. This article revisits the portrait of education in Indonesia by identifying the changes and challenges faced. Through an analysis of historical and contextual approaches, this article discusses the efforts that have been made to improve accessibility, quality, and equity in education in the country. In the portrait of education in Indonesia, there are gaps between urban and rural areas, challenges related to the quality of education, curriculum, teaching methods, and gender gap issues. In addition, this article illustrates the development of higher education and the importance of the role of the government, society, and other stakeholders in improving the portrait of education in Indonesia. By looking back at this portrait of education, it is hoped that it can create better and equitable education in Indonesia, contribute to sustainable development and improve the welfare of society as a whole.

To Cite this article:

Iskandar, K. (2022). Melihat Kembali Potret Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Religious Studies*, Vol. 02 No. 02 Agustus 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.57060/jers.v2i02.68>

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pendidikan adalah laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Dikatakan demikian, karena pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif dalam segala bidang kehidupan.

Bagi bangsa Indonesia krisis multidimensi membawa hikmah dan pelajaran yang luar biasa besarnya, yang pasti bangsa ini dapat menatap dan membangun masa depan dengan semangat yang lebih optimis. Masa lampau memperjelas pemahaman kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita kenal sekarang adalah hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita.

Pada masa yang telah lewat, dunia pendidikan terus berubah. Kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus menerus berubah, apalagi di dalam dunia terbuka, yaitu di dalam dunia modern dalam era globalisasi. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar. Tinjauan terhadap standardisasi dan kompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan akhirnya membawa kita dalam pengungkapan adanya bahaya yang tersembunyi yaitu, kemungkinan adanya pendidikan terkekang oleh standar kompetensi saja sehingga kehilangan makna tujuan pendidikan tersebut.

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci yang memainkan peran penting dalam pembangunan

¹ *Corresponding Author: Lecturer at Faculty of Tarbiyah in INKAFA Gresik, Indonesia. (cak.kus.305@gmail.com)

suatu negara. Di Indonesia, potret pendidikan telah mengalami perubahan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Sebagai negara yang memiliki populasi terbesar keempat di dunia, tantangan pendidikan di Indonesia sangatlah kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pada awal kemerdekaannya, sistem pendidikan di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah dan masyarakat telah mengupayakan berbagai reformasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu langkah yang diambil adalah peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan dengan membangun lebih banyak sekolah dan memperluas jaringan pendidikan di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di beberapa daerah terpencil, akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih terbatas, baik dalam hal infrastruktur maupun tenaga pengajar yang berkualifikasi. Hal ini menyebabkan kesenjangan pendidikan yang signifikan antara anak-anak di daerah perkotaan dengan mereka yang tinggal di pedesaan.

Selain itu, kualitas pendidikan juga menjadi perhatian serius. Meskipun ada peningkatan dalam hal akses, masih terdapat permasalahan terkait kurikulum, metode pengajaran, dan kualifikasi guru. Kurikulum yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja modern dan metode pengajaran yang terlalu fokus pada hafalan tanpa memperhatikan pemahaman konsep telah menjadi isu yang perlu diatasi. Selain itu, kualifikasi guru yang masih belum memadai juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Potret pendidikan di Indonesia juga mencakup isu mengenai kesenjangan gender. Meskipun perempuan memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan dibandingkan beberapa dekade yang lalu, masih terdapat kesenjangan dalam hal kesempatan pendidikan dan partisipasi perempuan di semua tingkatan pendidikan. Penting untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender dalam pendidikan, sehingga semua anak, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Dalam hal pendidikan tinggi, Indonesia juga terus mengalami perkembangan. Banyak universitas dan institusi pendidikan tinggi yang berupaya meningkatkan kualitas dan relevansi program studi yang ditawarkan. Hal ini penting mengingat tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks dan berkembang.

Dalam upaya memperbaiki potret pendidikan di Indonesia, peran pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan sangatlah penting. Pemerintah perlu terus mengalokasikan dana yang memadai untuk pendidikan, meningkatkan kualifikasi guru, dan memperbarui kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan masa depan. Sementara itu, masyarakat perlu mendukung pendidikan dengan melibatkan diri dalam kegiatan sekolah dan memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan anak-anak. Dengan kerja sama yang kuat antara semua pihak, potret pendidikan di Indonesia dapat terus diperbaiki dan diarahkan ke arah yang lebih baik. Pendidikan yang berkualitas dan merata akan menjadi landasan yang kuat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

KAJIAN TEORI

Dampak Krisis Multidimensi

Dewasa ini masalah dan problematika dalam dunia pendidikan bukan makin mengerucut namun makin bercabang dan makin banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah para pakar pendidikan. Istilah krisis multidimensi timbul dari beberapa krisis yang terdapat di negara kita dalam pendidikan dewasa ini, yaitu krisis ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, lingkungan hidup, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Keadaan negara kita yang masih belum sembuh dari krisis multidimensi membuat para pakar mencari-cari sebab dan solusinya. Salah satu penyebab terjadinya krisis tersebut yang hampir disepakati para ahli adalah karena adanya krisis dalam bidang moral dan etika.

Krisis dalam bidang moral dan etika inilah yang menyebabkan terjadinya krisis dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Terjadinya praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN), pelanggaran hak-hak asasi manusia, pelanggaran hukum, pencemaran lingkungan, terorisme, dan sebagainya adalah merupakan peristiwa atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang agama, moral dan etika. Oleh karena itulah dalam mengatasi krisis multidimensional yang terdapat di bangsa ini, yaitu harus dimulai dengan upaya membenahi krisis moral dan etika. Atas dasar inilah pendidikan agama, moral, dan etika sangat berperan besar dalam menjaga ketangguhan suatu bangsa dan negara.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 1989 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, masalah pendidikan agama, moral, dan etika mendapat perhatian yang amat besar. Dalam Bab I, tentang ketentuan

umum pasal 1 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa; pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan dan perubahan zaman (Nasional, 2009).

Selanjutnya dalam Bab III tentang dasar, fungsi, dan tujuan, pasal 3 dinyatakan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Nasional, 2009). Di dalam rumusan ini terlihat dengan jelas bahwa pendidikan agama, moral, dan etika merupakan pendidikan yang harus diberikan kepada seluruh peserta didik di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan agama, moral, dan etika harus mendasar pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan intelektual, keterampilan jasmani, pengembangan sains dan teknologi, dan bidang pendidikan lainnya. Dengan melalui pendidikan agama, moral dan etika inilah yang dapat membentuk manusia menjadi manusia yang ideal yang terbina seluruh potensi dalam dirinya baik jasmani maupun rohaninya, baik secara intelektual maupun spiritual yang kelak akan dapat memimpin bangsa dan negara dengan baik. Namun demikian, cita manusia ideal yang demikian itu masih belum dapat diwujudkan secara nyata dan merata melalui sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan pemerintah hingga saat ini. Dengan kata lain, secara konseptual, pemerintah telah berhasil merumuskan arah pendidikan yang ideal untuk bangsa Indonesia, namun masih belum mampu diwujudkan secara nyata.

Upaya menghasilkan pendidikan agama, moral, dan etika dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh dan bermutu untuk saat ini masih tampak sulit diwujudkan (Anam et al., 2019). Hal ini terjadi karena dunia pendidikan saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang belum dapat diatasi. Dunia pendidikan masih menghadapi masalah sumber daya manusia (guru) yang bermutu dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Demikian juga dalam bidang kurikulum dan metodologi pembelajaran juga belum benar-benar memberdayakan peserta didik untuk menjadi manusia yang unggul dan mandiri, baik dari segi intelektual, moral, maupun keterampilan dan kesehatan fisiknya. Dunia pendidikan kita sekarang baru menghasilkan lulusan yang mengetahui sesuatu yang serba terbatas, namun tidak disertai dengan kemampuan mempraktikkannya, menerapkan dalam pribadinya, dan mengamalkannya bagi kepentingan masyarakat.

Dalam kondisi pendidikan yang seperti itu, sulit rasanya menampilkan pendidikan yang benar-benar berperan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang tangguh di era globalisasi seperti sekarang ini. Namun demikian, keadaan pendidikan yang demikian itu telah membuka peluang bagi mereka yang berjiwa optimis untuk menawarkan berbagai program strategis yang berperan sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

Dari sejak mulai berdirinya republik ini, para tokoh nasional telah mengingatkan bahwa untuk membangun kehidupan bernegara dan berbangsa yang tangguh ini memerlukan pendidikan agama, moral dan etika. Tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, termasuk orang yang paling besar perhatiannya terhadap pentingnya pendidikan budi pekerti secara akademis, kokoh, dan komprehensif. Ia misalnya sangat menekankan pendidikan yang dijiwai semangat nasionalisme, kemandirian, kemerdekaan dan kebebasan dari pengaruh budaya asing, serta berusaha merumuskan konsep pendidikan budi pekerti yang kokoh bagi Indonesia (Kuswandi, 2005). Dalam pandangannya, budi pekerti adalah jiwa dari pengajaran. Budi pekerti bukanlah konsep yang bersifat teoritis sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya, dan bukan pula pengajaran budi pekerti dalam arti mengajar tentang teori baik buruk, benar salah dan seterusnya. Pengajaran budi pekerti tidak lain artinya daripada menyokong perkembangan hidup anak-anak, lahir dan batin, dari sifat kodratnya menuju ke arah peradaban dan sifatnya yang umum. Hal ini sejalan dengan visinya tentang pendidikan sebagai usaha kebudayaan yang berdasarkan peradaban, yakni memajukan hidup, agar mempertinggi derajat kemanusiaan (Dewantara, 2011).

Pandangan tentang pentingnya pendidikan budi pekerti juga dijumpai pada Muhammad Natsir. Menurutnya, bahwa pendidikan harus diarahkan kepada upaya menjadikan anak didik agar memiliki sifat-sifat kemanusiaan dengan mencapai akhlak al-karimah yang sempurna.

Selanjutnya dari kalangan tokoh wanita, muncul Zakiah Daradjat yang sejak awal berkiprah dalam

bidang pendidikan hingga akhir hayatnya menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan agama, moral, dan etika. Dengan menggunakan Islam sebagai acuan dasarnya, Zakiah Daradjat menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan adalah membina manusia agar menjadi hamba Allah yang saleh dengan seluruh aspek kehidupannya: perbuatan, pikiran, dan perasaannya (Daradjat & Dkk, 2000).

Pandangan para tokoh yang mengutamakan pentingnya pendidikan agama, moral, dan etika dalam hubungannya dengan mewujudkan ketahanan bangsa, dan negara adalah karena didasarkan pada kekhawatiran yang timbul pada masa tokoh tersebut hidup dan berkiprah di dunia pendidikan. Dunia pendidikan pada masa tokoh tersebut sudah menghadapi permasalahan moral dan etika walaupun keadaannya tidak seberat permasalahan moral dan etika yang dihadapi para pendidik di masa sekarang. Permasalahan pendidikan yang dihadapi pada masanya antara lain menghadapi kebijakan pemerintahan Belanda dan Jepang yang di dalamnya mengandung muatan merusak mental dan kepribadian bangsa Indonesia. Melalui berbagai kebijakannya, Belanda saat itu berusaha menanamkan mental budak dan mental ketergantungan, mengikis rasa nasionalisme dan patriotisme, menyebar fitnah, mengadu domba dan permusuhan, ikut mendukung penyebaran agama tertentu, diskriminatif dan sebagainya (Asrohah, 2010).

Tantangan pendidikan agama, moral, dan etika pada masa sekarang ini tentunya lebih berat dibandingkan dengan tantangan pada masa lalu. Kemajuan dan penguasaan atas sains dan teknologi yang berlangsung tanpa perspektif etis dan moral (seperti yang terjadi saat ini) akan menimbulkan berbagai konsekuensi, dan dampak negatif, yang dalam istilah Nasr membuat manusia makin jauh dari axis, dari pusat eksistensi-spiritualnya. Ini semua pada gilirannya menciptakan masalah-masalah kemanusiaan yang cukup berat, diantaranya krisis lingkungan, ketergantungan yang akhirnya berujung kepada konflik dan perang, krisis nilai-nilai etis, kekosongan nilai-nilai rohaniyah dan sebagainya. Tantangan yang berdampak kehancuran moral dan etika inilah yang melatarbelakangi mengapa sistem pendidikan nasional saat ini amat menekankan pentingnya pendidikan agama, moral, dan etika.

Problem Dasar Pendidikan di Indonesia

Permasalahan pendidikan merupakan suatu penghambat keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Beberapa masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut: a. Pemerataan Pendidikan; b. Mutu dan Relevansi Pendidikan; c. Efisiensi dan Efektifitas.

a. Pemerataan Pendidikan

Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan, hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah, tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

Pada sisi ini, sepintas dapat dipahami bahwa selama ini belum semua masyarakat bangsa Indonesia dapat merasakan manisnya pendidikan. Jika hendak dicermati, maka persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh (1) Perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat; (2) Perbedaan fasilitas pendidikan; (3) Sebaran sekolah tidak merata; (4) Nilai masuk sebuah sekolah dengan standart tinggi; (5) Rayonisasi.

Yang paling utama permasalahannya di Indonesia adalah tingkat ekonomi. Semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat, maka peluang untuk mendapatkan pendidikan yang tenaga pengajarnya berkualitas semakin kecil. Serta fasilitas dalam pendidikan juga dapat diukur dengan uang. Semakin mahal sekolah, biasanya akan semakin memadai fasilitas yang ada.

Iklan “pendidikan gratis” telah membawa anggapan bagi masyarakat untuk tidak mengeluarkan biaya sepeser pun padahal dalam kenyataannya tidak demikian. Anggapan seperti ini salah karena pendidikan pada realita mengeluarkan uang, mulai dari biaya seragam, sumbangan pembangunan, dan lain-lainnya. Bagi orang yang tidak mampu atau di kawasan tertinggal akan memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan dan menyebabkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia.

Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana

dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini.

b. Mutu dan Relevansi Pendidikan

Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar (Sagala, n.d.).

Kinerja guru merupakan serangkaian hasil dari proses dalam melaksanakan pekerjaannya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan seorang guru untuk menciptakan model pembelajaran baru atau memunculkan kreasi baru akan membedakan dirinya dengan guru lain (Hasan Baharun, 2017).

Itulah sebabnya seorang tenaga pengajar harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran, hal ini akan berpengaruh juga terhadap kecepatan daya tangkap suatu ilmu yang dicerna oleh peserta didik selama proses pembelajaran.

c. Efisiensi dan Efektifitas Pendidikan

Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktifitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, dimana pemanfaatan segala sumberdaya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani.

Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan dimana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana / program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Ketidak efektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran.

Selanjutnya terdapat faktor pendukung dari permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu hadirnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimana peningkatan dan pengembangan SDM serta teknologi dalam mempersiapkan generasi penerus suatu bangsa dilaksanakan melalui pembelajaran di sekolah. Penemuan teknologi baru di dalam dunia pendidikan, menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi tidaklah mudah, hal ini sangat menuntut kesiapan SDM Indonesia untuk menjalankannya. Kedua, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampungnya. Jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak bersekolah. Hal ini akan menimbulkan masalah pemerataan pendidikan. Akan tetapi apabila jumlah dan daya tampung suatu sekolah dipaksakan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara tenaga pengajar dengan peserta didik. Jika keadaan ini dipertahankan, maka mutu dan relevansi pendidikan tidak akan dapat dicapai dengan baik. Ketiga, permasalahan pembelajaran. Pada saat sekarang ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan cenderung pasif, dimana seorang pendidik selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu. Hal ini akan menimbulkan kejengahan terhadap peserta didik. Sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi tidak menarik dan cenderung membosankan. Kegiatan belajar yang terpusat seperti ini merupakan masalah yang serius dalam dunia pendidikan.

HASIL DAN DISKUSI

Perlunya Reformasi Pendidikan

Fakta-fakta yang penulis kemukakan di atas hingga saat ini menjadi permasalahan dalam sistem

pendidikan di Indonesia. Realitas tersebut dipandang cukup memadai untuk dijadikan alasan akan perlunya reformasi di bidang pendidikan, akan tetapi reformasi pendidikan yang terprogram (Anam, 2021). Dan yang dimaksud reformasi terprogram ini adalah inovasi. Inovasi yang dimaksudkan adalah tindakan memperkenalkan ide baru, metode baru atau sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam sistem dan proses pendidikan agar terjadi perubahan secara mencolok dari sebelumnya dengan maksud-maksud tertentu yang ditetapkan. Begitu juga dalam pelaksanaannya, diperlukan standar dan tujuan reformasi yang jelas, karena tanpa tujuan yang jelas reformasi hanyalah sekedar upaya untuk berubah tanpa makna. Ada hal penting dalam konteks ini, yaitu akuntabilitas dan transparansi untuk mengukur kemajuan reformasi yang dijalankan.

Menurut Sutrisno, bahwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 berdampak langsung pada Bangsa kita, bukan saja pada bidang politik dan ekonomi, tetapi juga pada bidang pendidikan. Reformasi itu sebagai momentum untuk melakukan pembaharuan sistem perundang-undang pendidikan di Indonesia. Diawali UUD 1945 oleh DPR-MPR tahun 2002, terutama pasal 31 yang mengamanatkan pada Negara/pemerintah untuk memperbaiki/menyempurnakan sistem pendidikan nasional. Kemudian dikeluarkan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Setelah Indonesia mengalami reformasi tersebut, kemudian kita memasuki era baru, yaitu era setelah tumbangnya orde baru yaitu orde reformasi. Orde reformasi dapat difahami sebagai orde keterbukaan dalam mengemukakan pendapat. Orde keterbukaan ini bukan hanya dimanfaatkan oleh kalangan pers dan politik saja, akan tetapi juga untuk dunia Pendidikan (Zainuddin, 2008). Maka memasuki Millennium ketiga ini dunia pendidikan dihadapkan kepada berbagai permasalahan pelik yang apabila tidak diatasi secara cepat, tidak mustahil pendidikan di Indonesia akan ditinggal oleh zaman. Menurut hemat saya, langkah preventif dalam menyikapi tantangan ini, maka sangat diperlukan kesadaran akan tampilnya dunia pendidikan guna memecahkan dan merespon berbagai tantangan baru di era Global ini adalah hal yang logis bahkan suatu keharusan. Hal ini dapat dimengerti mengingat dunia pendidikan merupakan salah satu pranata yang terlibat langsung dalam mempersiapkan masa depan bangsa ke arah lebih baik. Perlu disadari dan diwaspadai bersama, bahwa kegagalan dunia pendidikan dalam menyiapkan masa depan bangsa, adalah merupakan kegagalan bagi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia.

Peran dan tanggungjawab pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sangatlah diperlukan untuk terus melakukan self-correction terhadap setiap kebijakan di bidang pendidikan dan juga melakukan re-orientasi terhadap visi dan misi sangatlah penting, mengingat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia selama kurang lebih 67 tahun setelah kemerdekaan dimungkinkan telah banyak muncul tantangan baru yang belum tertampung, untuk menjawabnya, salah satunya adalah perlunya dirumuskan kembali visi dan misi pendidikan nasional yang sesuai dengan tuntutan zaman terutama di era globalisasi ini (Jalal, 2001).

Perlu juga disadari, bahwa masa depan Bangsa Indonesia yang sekarang tengah memasuki millenium ketiga ini sangat ditentukan oleh seberapa jauh untuk mampu eksis secara fungsional di tengah-tengah kehidupan Global yang amat kompetitif, dan pada situasi ini, manusia yang akan survive adalah yang dapat merubah tantangan menjadi peluang serta dapat mengisi peluang tersebut secara produktif. Sementara itu, faktor-faktor keperibadian atau moralitas yang baik akan menjadi salah satu daya tarik dalam berkomunikasi dengan sesama manusia atau warga dunia (Danajaya, 2012).

Atas dasar itu, maka masa depan bangsa kita sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kreatif, inovatif, dinamis, terbuka, bermoral baik, mandiri dan percaya diri, menghargai waktu, mampu berkomunikasi dan memanfaatkan peluang serta menjadikan orang/bangsa lain sebagai mitra.

Untuk dapat mewujudkan manusia yang sanggup menghadapi tantangan, peluang dan kendala dalam memasuki kehidupan masa depan itu, sektor pendidikan memiliki banyak peluang yang amat luas untuk segera melakukan berbagai inovasi dalam merespon kebutuhan masyarakat salah satunya adalah merubah paradigma untuk menciptakan masyarakat yang semangat untuk belajar (H.A.R. Tilaar, n.d.).

Menurut Aris Pongtuluran, reformasi akan berhasil apabila tersedia kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan. Artinya, perlu ada momentum yang mendukung, seperti perombakan besar-besaran dalam system pemerintahan, ada undangundang yang melindungi, atau pemimpin yang peduli akan pentingnya reformasi. Akhirnya, reformasi pendidikan tersebut harus dijadikan sebagai kebijakan pendidikan.

Artinya, reformasi pendidikan itu dijadikan patokan kebijakan jangka panjang dalam setiap langkah pengambilan keputusan praktik pendidikan. Reformasi harus berada dalam kerangka kerja jangka panjang dan menjadi inti dari setiap kebijakan dan operasional pendidikan.

Apabila reformasi pendidikan akan dijadikan sebagai kebijakan, maka harus memenuhi empat tahapan. Menurut Levin Benjamin, tahapan-tahapan itu satu sama saling terkait, yaitu; asal-usulnya, adopsinya, implementasi dan hasilnya. pertama, adalah asal-usulnya (origin), darimana datangnya usulan reformasi pendidikan tersebut? bagaimana reformasi pendidikan menjadi bagian dari aspek pemerintahan secara umum, peran apa yang dimainkan oleh masing-masing pihak dalam mengembangkan program tersebut.

Kedua, bagaimana mengadopsi (adoption) kebijakan tersebut yang akhirnya menjadi peraturan atau perundang-undangan. Untuk itu, perlu juga dipantau sejauhmana perbedaan antara yang diusulkan dengan yang diundangkan dan apa-apa penyebab dari perbedaan tersebut. Ketiga, bagaimana implementasinya (implementation)? Dalam hal ini, untuk melakukan reformasi kebijakan maka diperlukan lembaga penelitian untuk memantau pelaksanaan reformasi. Model seperti apa yang digunakan oleh pemerintah sehingga mampu menggerakkan reformasi hingga ke tingkat operasional? Pertanyaan lain adalah kebijakan apa yang mendukung adanya reformasi dan bagaimana sistem pendidikan merespon gerakan reformasi tersebut? Keempat, bagaimana hasil-hasilnya (outcomes)? Bukti-bukti apa yang menunjukkan adanya perubahan sebagai akibat dari reformasi yang dilakukan. Dalam pendidikan, bukti nyata biasanya adalah bagaimana reformasi berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar di kalangan siswa, terjadinya peningkatan kinerja pada guru dan dosen serta tenaga kependidikan, adanya kenaikan jumlah kelulusan, dan sebagainya.

Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang samasama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Abidin menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Ali Imron dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan Negara. Carter V Good (1959) memberikan pengertian kebijakan pendidikan (educational policy) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. Kebijakan pendidikan sangat erat hubungannya dengan kebijakan yang ada dalam lingkup kebijakan publik, misalnya kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, keagamaan dan lain-lain. Konsekuensinya kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan publik maka kebijakan pendidikan bisa berubah. Ketika kebijakan politik dalam dan luar negeri, kebijakan pendidikan biasanya akan mengikuti alur kebijakan yang lebih luas. Bahkan pergantian menteri dapat pula mengganti kebijakan yang telah mapan pada jamannya. Bukan hal yang aneh, ganti menteri berganti kebijakan.

Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturanaturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal (Bakty, 2010; Tangkilisan, 2003). Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (*policy making*) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), *output* (keluaran), dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi.

Arah Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti;
- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;
- c. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
- d. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai; Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
- e. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- f. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya;
- g. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.

KESIMPULAN

Istilah krisis multidimensi timbul dari beberapa krisis yang terdapat di negara kita dalam pendidikan dewasa ini, yaitu krisis ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, lingkungan hidup, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Keadaan negara kita yang masih belum sembuh dari krisis multidimensi membuat para pakar mencari-cari sebab dan solusinya. Salah satu penyebab terjadinya krisis tersebut yang hampir disepakati para ahli adalah karena adanya krisis dalam bidang moral dan etika. Krisis dalam bidang moral dan etika inilah yang menyebabkan terjadinya krisis dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnya. Oleh karena itulah dalam mengatasi krisis multidimensional yang terdapat di bangsa ini, yaitu harus dimulai dengan upaya membenahi krisis moral dan etika. Atas dasar inilah pendidikan agama, moral, dan etika sangat berperan besar dalam menjaga ketangguhan suatu bangsa dan negara.

Beberapa masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia, antara lain adalah tentang Pemerataan Pendidikan; Mutu dan Relevansi Pendidikan; Efisiensi dan Efektifitas Pendidikan. Hal ini dipandang cukup memadai untuk dijadikan alasan akan perlunya reformasi di bidang pendidikan, akan tetapi reformasi pendidikan yang terprogram. Dan yang dimaksud reformasi terprogram ini adalah inovasi. Inovasi yang dimaksudkan adalah tindakan memperkenalkan ide baru, metode baru atau sarana baru untuk meningkatkan beberapa aspek dalam sistem dan proses pendidikan agar terjadi perubahan secara mencolok dari sebelumnya dengan maksud-maksud tertentu yang ditetapkan. Begitu juga dalam pelaksanaannya, diperlukan standar dan tujuan reformasi yang jelas, karena tanpa tujuan yang jelas reformasi hanyalah sekedar upaya untuk berubah tanpa makna. Ada hal penting dalam konteks ini, yaitu akuntabilitas dan transparansi untuk mengukur kemajuan reformasi yang dijalankan.

Selanjutnya pemerintah membuat kebijakan di sektor pendidikan. Kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di era otonomi daerah kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah: (1) Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (School Based Management), (2) Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas (community based education), (3) Dengan menggunakan paradigma belajar atau learning paradigma, (4) Pemerintah juga mencanangkan pendidikan berpendekatan Broad Base Education System (BBE). Proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci, program-program aksi telah dirancang

dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut..

REKOMENDASI

Tulisan ini merupakan hasil analisis konseptual sehingga temuan ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Mengingat kajian ini menjadi hal penting untuk didalami lebih fundamental dengan harapan pendidikan di Indonesia bisa lebih baik lagi.

ACKNOWLEDGEMENT

Naskah akademik ini sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya antara lain sudah diseminarkan kelas formal dan direview oleh banyak ahli. Penulis ucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik yang telah membantu mensukseskan tulisan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Anam, S. (2021). Education Reform; Between Hope and Reality. *Journal of Education and Religious Studies*, 1(01), 1–8.
- Anam, S., Degeng, I. N. S., Murtadho, N., & Kuswandi, D. (2019). The moral education and internalization of humanitarian values in pesantren. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 7(4). <https://doi.org/10.17478/jegys.629726>
- Asrohah, H. (2010). *Sejarah Pendidikan Islam*. Logos.
- Bakty, A. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Journal Medtek*, 02(01).
- Danajaya, U. (2012). *Reformasi Pendidikan*. KOMPAS.
- Daradjat, Z., & Dkk. (2000). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Dewantara, K. H. (2011). Bagian Pertama Pendidikan. In *Karya Ki Hajar Dewantara*. Yayasan Persatuan Taman Siswa.
- H.A.R. Tilaar. (n.d.). *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21* (Malang). Tera Indonesia.
- Hasan Baharun, Z. (2017). *Manajemen Mutu Pendidikan : Ikhtiar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah melalui Pendekatan Balanced Scorecard*. Akademia Pustaka.
- Jalal, F. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita Karya Nusa.
- Kuswandi, D. (2005). *Pengejawantahan Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara di Lingkungan Ibu Pawiyan Tamansiswa Yogyakarta*.
- Nasional, K. P. (2009). *Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003*. Fokus Media.
- Sagala, S. (n.d.). *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Alfabeta.
- Tangkilisan, H. Nogi. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset YPAPI.
- Zainuddin, M. (2008). *Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah*. Pustaka Pelajar.